Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Desmawati Roza^{✉1}, Nurhafizah², Yaswinda³

Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang

DOI: [10.31004/obsesi.v4i1.325](https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325)

Abstrak

Anak secara hukum berhak mendapatkan perlindungan, namun dalam kenyataannya hak-hak anak masih belum terlindungi dan terpenuhi secara optimal terutama di lembaga PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya profesionalisme guru PAUD dalam penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian ditemukan bahwa Profesionalisme Guru anak usia dini sangat penting dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak karena sebagian besar kasus perlindungan anak terjadi dalam lembaga pendidikan.

Kata Kunci: *profesionalisme guru; perlindungan; anak usia dini*

Abstract

Children are legally entitled in Indonesia to get protection, but in reality children's rights are still not protected and optimally fulfilled, especially in PAUD institutions. This study aims to explain the importance of PAUD teacher professionalism in the implementation of child protection based on Law Number 35 Year 2014. The results found that the professionalism of early childhood teachers is very important in the implementation of Child Protection because most cases of child protection occur in educational institutions

Keywords: *teacher professionalism; protection; early childhood*

Copyright (c) 2019 Desmawati Roza, Nurhafizah, Yaswinda

✉ Corresponding author :

Email Address : rozadesmawati95@gmail.com (Padang, Indonesia)

Received 16 November 2019, Accepted 23 November 2019, Published 26 November 2019

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa sehingga keberadaannya harus diperhatikan agar kelak mampu menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Menurut (Indonesia, 2014) pada Bab I pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Jadi anak yang dimaksud berdasarkan Undang-undang yaitu anak yang berusia 0 sampai 17 tahun.

Anak usia dini merupakan suatu fase yang pertama dilalui oleh anak. Anak usia dini berada pada rentan usia 0-6 tahun (Isnainingsih & Rohman, 2019). Setiap anak pasti melalui masa usia dini. Menurut NAEYC anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun. Seluruh anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan (Indonesia, 2014) pada Bab I pasal 49 bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orangtua

wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan untuk anak usia dini dikenal dengan istilah pendidikan anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar pada diri anak secara optimal. Sebagaimana dijelaskan dalam (*Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*) Bab I pasal 1 Nomor 14 yang menyatakan “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Menurut (Indonesia, 2014) tentang perlindungan anak bahwa seluruh anak berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Penyelenggaraan perlindungan anak diatur oleh undang-undang dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ikut serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perannya sangat ditentukan oleh guru atau pendidik. Kualitas profesionalisme guru sangat menentukan tingkat kesadaran guru dalam menjalankan perannya secara optimal sebagai penyelenggara perlindungan anak. Guru yang profesionalisme adalah guru yang ahlian sesuai di bidangnya dan memiliki kompetensi pedagogi, sosial, kepribadian dan profesionalisme. Guru yang profesional akan menyadari betapa pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang harus dilindungi agar tumbuh kembang anak dapat distimulasi secara optimal.

Namun kenyataannya masih banyak guru PAUD yang belum profesional sehingga tidak ada kesadaran untuk menjalankan perannya sebagai penyelenggara perlindungan anak. Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata 5 kasus setiap minggu yang diterima oleh lembaga perlindungan anak. Salah satu pelaku dalam perenggutan hak anak adalah lembaga pendidikan. Lembaga PAUD salah satu lembaga yang menjadi solusi. Pembelajaran yang diberikan guru PAUD dalam penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting, karena pembelajaran tentang konsep moral harus ditanamkan sejak usia dini. Pembentukan kepribadian dan pengetahuan yang tepat dapat mengurangi kasus penyimpangan anak yang disebabkan oleh ketidaktahuan anak seperti anak yang melakukan tindakan asusila. Selain itu lembaga PAUD menjadi sarana sosialisasi yang diberikan guru PAUD dan lembaga-lembaga perlindungan anak kepada orangtua dan masyarakat untuk memberikan hak-hak anak seperti hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan penghargaan/pujian, hak anak untuk mengeluarkan pendapat, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan/tidak diterlantarkan. Anak yang terlindungi baik secara fisik, mental, hak maupun dari penyimpangan akan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal tanpa gangguan dan hambatan.

METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada lembaga DP3AP2KB dan Polresta Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Alat observasi yang digunakan berbentuk format wawancara dilakukan pada narasumber di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Data dokumentasi berupa foto, rekaman dan video sebagai lampiran untuk memperkuat hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang (Anhusadar & Islamiyah, 2019). Anak usia dini sosok yang sangat membutuhkan stimulasi secara maksimal dalam proses pertumbuhan dan

perkembangannya.. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. (Suryana, 2013a) menyatakan anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk sosiokultural yang sedang mengalami proses perkembangan yang sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dan memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Menurut Cross dalam (Madyawati, 2017) mengemukakan bahwa karakteristik anak usia dini yaitu a) bersifat egosentris; b) bersifat unik; c) mengekspresikan prilakunya secara spontan; d) bersifat aktif dan energik; e) memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal; f) bersifat eksploratif dan jiwa petualang; g) kaya dengan fantasi; h) masih mudah frustrasi; i) kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu; j) memiliki daya perhatian yang pendek; k) memiliki masa belajar yang paling potensial. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan individu yang sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam berbagai aspek.

Pendidikan merupakan suatu proses pemberian rangsangan agar potensi yang ada pada anak dapat berkembang secara optimal (Watini, 2019). Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun. (Wasposito, 2012) Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi yang kaya dan bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Menurut Siibak dan Vinter dalam (Madyawati, 2017) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia lahir sampai enam tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sarana yang berperan penting. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pondasi dasar bagi penanaman pengetahuan bagi anak karena pada usia ini merupakan masa keemasan sehingga perkembangan anak akan maksimal apabila dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik anak. Pendidikan anak usia dini sangat penting diantaranya membantu mengembangkan seluruh potensi dan kecerdasan anak yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan selanjutnya.

Tabel 1. Rata-rata Kasus Perlindungan Anak Januari-Juni 2019

Kasus Perlindungan Anak	
Diselesaikan Pihak Lembaga Perlindungan Anak	155 Kasus
Berlanjut ke Pihak Kepolisian	25 Kasus
Total	180 Kasus

Sumber Data: DP3AP2KB dan Polresta Kota Padang

Berdasarkan tabel diketahui terdapat rata-rata 180 kasus selama 6 bulan. Terdapat 155 kasus yang diselesaikan oleh pihak lembaga perlindungan anak. Menurut DP3AP2KB hanya sebagian kecil yang berlanjut ke ranah hukum oleh Polresta Kota Padang. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak lembaga-lembaga perlindungan anak bersama pihak-pihak lainnya seperti organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh agama dan lembaga pendidikan membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Anak adalah individu yang lemah, rentan dan penuh dengan ketidaktahuan. Anak adalah sosok yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang terutama perlindungan (Faried, 2017). Menurut (Muda & Alwi, 2012) Semua anak memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bebas dari pelecehan dan penelantaran. Seringkali anak menjadi korban atau pelaku karena ketidatahuannya oleh karena itu secara hukum setiap anak memiliki hak untuk dilindungi. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang (Pulunggono & Chalim, 2017). Menurut (Fitriani, 2016) Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut (Indonesia, 2014) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak.

Hak anak menurut (Indonesia, 2014) Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Beberapa perlakuan yang dilarang dilakukan kepada anak menurut (Indonesia, 2014) BAB XIA pasal 76 (1) Setiap orang dilarang: memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif; (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran; (3) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak; (4) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (5) Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (6) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak; (7) Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa; (8) Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Anak dilindungi oleh undang-undang Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: (1) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) pemisahan dari orang dewasa; (3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) pemberlakuan kegiatan rekreasi; (5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; (6) penghindaran dari penjatuh pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; (7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya; (10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; (11) pemberian advokasi sosial; (12) pemberian kehidupan pribadi; (13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; (14) pemberian pendidikan; (15) pemberian pelayanan kesehatan; dan (16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guru pada lembaga pendidikan memiliki peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan (Indonesia, 2014) Pasal 72 Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga

perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Guru merupakan salah satu pihak yang sangat terlibat di lembaga pendidikan. Menurut (Sujiono, 2012) Guru didefinisikan sebagai seseorang yang dipercayakan dengan pendidikan dan pembentukan pikiran. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (Nurkholis & Badawi, 2019). Guru harus memiliki keahlian dan kesadarannya tentang tugas yang harus dijalankannya. Hal tersebut dikenal dengan istilah profesionalisme. Profesionalisme merupakan salah satu hal yang harus dimiliki guru dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Menurut Hamzah B. Uno dalam (Febrialismanto, 2017) seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang dapat ditunjukkan oleh peserta didiknya oleh karena itu apabila seorang ingin menjadi guru yang profesional maka sudah seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan pengetahuan akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang ataupun *upgrading* dan pelatihan. Pengembangan dan peningkatan kualitas profesionalisme guru sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran

Menurut (Kobaa, 2018) Kata profesional menunjukkan bahwa seorang guru harus mampu bersaing didalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan juga harus selalu meningkatkan keahlian dan kecakapan dalam melakukan tugas sebagai seorang guru. Menurut (Díaz-maggioli, 2006) Pengembangan profesional dapat didefinisikan sebagai proses karir panjang yang mana pendidik menyempurnakan pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pembelajaran. Menurut (Mufidah, 2019) profesional ialah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, dimana yang bersangkutan dapat membuat keputusan dengan independen dan adil. Menurut (Yuslam, Setiani, & Sari, 2017) guru merupakan profesi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. kemampuan profesional guru terus ditingkatkan agar guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik (Maiza & Nurhafizah, 2019). Oleh karena itu meningkatkan profesional bagi guru adalah hal yang penting..

Menurut (Febrialismanto, 2017) Kompetensi dikategorikan mulai dari tingkat sederhana atau dasar hingga lebih sulit atau kompleks yang pada gilirannya akan berhubungan dengan proses penyusunan bahan atau pengalaman belajar, yang lazimnya terdiri dari: (1) penguasaan minimal kompetensi dasar, (2) praktik kompetensi dasar, dan (3) penambahan penyempurnaan atau pengembangan terhadap kompetensi atau keterampilan. Ketiga proses tersebut dapat terus berlanjut selama masih ada kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau pengembangan kompetensinya.

Kompetensi guru sesuai dengan peraturan menteri nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menurut (Suryana, 2013b) Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kedua Kompetensi kepribadian sekurang kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Ketiga Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.

Keempat Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Kualitas profesionalisme guru sangat menentukan tingkat kesadaran guru dalam menjalankan perannya secara optimal sebagai penyelenggara perlindungan anak. Guru yang profesional akan menyadari betapa pentingnya pemenuhan hak-hak anak yang harus dilindungi agar tumbuh kembang anak dapat distimulasi secara optimal. Oleh karena itu kualitas profesionalisme guru harus selalu ditingkatkan seperti melalui menempuh pendidikan formal, menambah pengalaman, mengikuti pelatihan-pelatihan maupun pendidikan untuk mendapatkan sertifikat guru PAUD sehingga seluruh anak-anak mendapatkan haknya dan terjalin kerjasama dalam penyelenggaraan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.

SIMPULAN

Anak merupakan individu yang lemah, rentan dan penuh dengan ketidaktahuan sehingga anak sering menjadi korban atau pelaku karena ketidatahuannya oleh karena itu secara hukum setiap anak memiliki hak untuk dilindungi. Berdasarkan (Indonesia, 2014) tentang Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Pembelajaran yang diberikan guru PAUD dalam penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting karena pembentukan kepribadian dan pengetahuan yang tepat dapat mengurangi kasus penyimpangan anak yang disebabkan oleh ketidaktahuan anak. Lembaga PAUD menjadi sarana sosialisasi yang diberikan guru PAUD dan lembaga-lembaga perlindungan anak kepada orangtua dan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas profesionalisme guru akan menjalin kerjasama dan mengoptimalkan peran guru dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan dosen magister PAUD fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang yang memberikan masukan dalam penulisan artikel ini serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhusadar, L. O., & Islamiyah. (2019). Taman Layak Anak Usia Dini di Kota Kendari. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 117-126. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.106>
- Díaz-maggioli, G. (2006). Professional Development Calendar. In E. Yermoli (Ed.), *Healthcare Executive* (Vol. 21). United States of America: The Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Fariied, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017*, 11(01), 41-55.
- Febrialismanto, F. (2017). Analisis Kompetensi Profesional Guru PGPAUD Kabupaten

- Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 121–136.
<https://doi.org/10.21831/jpa.v6i2.17700>
- Fitriani, R. (2016). Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Hukum, Jurnal Keadilan, Samudra*, 11(2), 250–258.
- Indonesia, R. (2003). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-undang Perlindungan Anak No. 35*.
- Isnainingsih, A., & Rohman, A. (2019). Participation of Mothers Who Work in Religious Activities Towards Child Behavior. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 199. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.157>
- Kobaa, H. (2018). Pengaruh Sertifikasi dan Profesionalisme Guru terhadap Kinerja Guru di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. *Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 1(2), 21–25.
- Madyawati, L. (2017). *Strategi Pengembangan Bahasa pada Anak*. Kencana:Jakarta.
- Maiza, Z., & Nurhafizah, N. (2019). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 356. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.196>
- Muda, T. F. M. B. T., & Alwi, E. A. Z. B. E. (2012). Care and protection against child abuse: With special reference to Malaysia child act 2001. *Asian Social Science*, 8(1), 202–208. <https://doi.org/10.5539/ass.v8n1p202>
- Mufidah, L. I. (2019). Tantangan Profesionalisme Guru pada Era Globalisasi. *Lentera*, 18(2), 174–186.
- Nurkholis, M. A., & Badawi. (2019). Profesionalisme Guru di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Madiun 12 Januari 2019*, 491–498.
- Pulunggono, W., & Chalim, M. A. (2017). Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 377–386.
- Sujiono. (2012). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. In *PT Indeks*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4151-8_4
- Suryana, D. (2013a). Pendidikan Anak Usia Dini. Padang. *UNP Press:Padang*.
- Suryana, D. (2013b). Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Peraturan Menteri N0. 58 Tahun 2009. *PEDAGOGI Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 13(1), 40–46.
- Waspodo, M. (2012). Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi Guru PAUD. *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI*, 7(1), 77–81.
- Watini, S. (2019). Pendekatan Kontekstual dalam Meningkatkan Hasil Belajar Sains pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.111>
- Yuslam, Y., Setiani, R. E., & Sari, A. K. (2017). Studi Tentang Kompetensi Guru PAUD Berkualifikasi Akademik Sarjana PG-PAUD Dan NonPG-PAUD di PAUD Istiqomah Sambas Purbalingga. *Al-Athfal : Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 151. <https://doi.org/10.14421/al-athfal.2017.32-04>